

## STRATEGI KAMPANYE PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN PURWAKARTA DALAM MEMPEROLEH KURSI DI DPRD KABUPATEN PURWAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM 2019

Rima Nurmalina<sup>1</sup>, Wawan Budi Darmawan<sup>2</sup>, Husin M. Al Banjari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, 456363

Email: rimanurma2@gmail.com<sup>1</sup>; husin.albanjari@unpad.ac.id<sup>2</sup>; wawan.budi.darmawan@unpad.ac.id<sup>3</sup>

*Submitted: 27-12-2022; Accepted: 02-02-2023; Published :03-02-2023*

### ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa bagaimana strategi kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta dalam upaya memperoleh kursi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan umum tahun 2019 secara empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan unit analisis adalah anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, tim kampanye Partai Keadilan Sejahtera Purwakarta dan relawan atau simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Purwakarta. Data dari tim kampanye Partai Keadilan Sejahtera diambil guna mengetahui strategi kampanye yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk mendapatkan kursi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Tidak hanya tim kampanye tetap juga data diambil secara individu dari tiap anggota DPRD dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk mengetahui langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh anggota legislatif terpilih untuk mendapatkan kursi anggota DPRD. Selain tim kampanye, individual anggota DPRD, unit analisis selanjutnya adalah penyelenggara pemilihan umum atau komisi pemilihan umum Purwakarta, informasi yang dibutuhkan dari komisi pemilihan umum Purwakarta adalah data-data perolehan suara dan proses penetapan kursi anggota DPRD. Terakhir unit analisis adalah akademisi atau para pengamat yang ikut mengamati proses pemilihan umum di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam upaya mendapatkan kursi anggota DPRD, Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta melakukan strategi kampanye ofensif maupun defensif untuk meraih dukungan dari pemilih sehingga dapat menaikkan jumlah suara pada Pemilihan umum 2019 secara signifikan. Strategi ofensif merupakan strategi untuk memperluas pasar dengan cara optimalisasi *platform* dan programnya, memperluas jaringan dengan merekrut calon legislatif dari luar kader, serta menarik kelompok pemilih baru dengan memperluas jangkauan ke pelosok desa. Sedangkan strategi defensif dilakukan melalui dua cara yaitu (1) melepas pasar; dan (2) mempertahankan pasar.

**Kata kunci:** Strategi Kampanye; Strategi Politik; Pemilihan Umum; Perolehan Suara

## PENDAHULUAN

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta mengalami lonjakan kursi sebanyak 500% dari sebelumnya tidak memiliki kursi pada pemilihan umum sebelumnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta. Pada Pemilihan Umum (Pemilihan umum) 2019 ternyata Partai Keadilan Sejahtera berhasil memperoleh lima kursi di DPRD Kabupaten Purwakarta. Kenaikan ambang batas parlemen (*parliamentary treshold*) pada Pemilihan umum 2019 menjadi empat persen, membuat persaingan partai politik dalam meraih suara menjadi semakin sengit. Dalam konteks itu setiap partai politik menyusun strategi kampanye demi mencapai perolehan suara sebanyak mungkin untuk meraih kursi di parlemen (Ani, 2019).

Banyak tokoh-tokoh dan Pendukung loyal PKS yang berpindah Haluan ke GARBI. Perpecahan di internal partai makin diperparah oleh banyaknya calon legislatif di daerah yang mengundurkan diri, contohnya di Provinsi Bali dan Kabupaten Tangerang (Kirom, 2019).

Kenaikan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) pada Pemilu 2019 menjadi empat persen, membuat persaingan partai politik dalam meraih suara menjadi semakin sengit (Fakta Jabar, 2019). Dalam konteks itu setiap partai politik menyusun strategi kampanye demi mencapai perolehan suara sebanyak mungkin, untuk meraih kursi di parlemen.

Terkait dengan ambang batas tersebut, para pengamat melakukan berbagai survei yang memprediksi partai-partai tertentu tidak akan lolos ambang batas sehingga tidak akan memperoleh kursi di parlemen. Salah satu partai yang diprediksi tidak akan lolos berdasarkan hasil survei pada tahun tersebut diprediksi bahwa Partai Keadilan Sejahtera akan mendapatkan suara sebesar 2-4% dan diprediksi tidak akan lolos. Faktanya Partai Keadilan Sejahtera berhasil menepis hasil-hasil survei tersebut dengan menaikkan jumlah suaranya pada Pemilihan umum 2019 sebanyak 1.42%, yaitu dari 6,79% pada Pemilihan umum 2014 menjadi 8.21% pada Pemilihan umum 2019. Meski nampaknya kenaikan itu hanya sedikit (1,42%), namun itulah yang mengubah nasib Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta dari 0 kursi menjadi 5 kursi (Sukmana, 2018).

Menurut Tiyas da Handoko (2017), strategi politik yang dapat dilakukan oleh partai politik dalam menghadapi kontes politik lokal meliputi pemetaan politik strategis, persiapan perencanaan, membangun sumber daya, analisis lingkungan internal dan eksternal, menyusun strategi pengaruh

besar perilaku memilih, mobilisasi, pencitraan dan koordinasi. Sejalan dengan penelitian tersebut, Timbangnusa (2015) mengemukakan untuk meraih perolehan suara yang signifikan dan mampu mendapatkan kursi terbanyak makan dibutuhkan strategi-strategi politik dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dimana mengutamakan solidaritas internal dan membangun komunikasi yang sangat efektif. Namun kurang memperhatikan perekrutan kader batu dengan tujuan menjadi anggota partai.

Partai Keadilan Sejahtera pernah mencoba menggunakan strategi politik waktu pemilihan legislative di Boyolali tahun 2014, penelitian tersebut dilakukan dengan latar belakang oleh fenomena banyaknya pemberitaan negative mengenai Partai Keadilan Sejahtera terkait kasus-kasus nasional yang menimpa kader-kader Partai Keadilan Sejahtera. Pada saat itu Partai Keadilan Sejahtera menggunakan Marketing Politik yaitu *tragetting, positioning, media dan direct selling* (Perdana, 2014).

Kemudian di tahun 2019, Partai Keadilan Sejahtera pernah mencoba menggunakan strategi politik waktu pemilihan umum 2019 khususnya di Jawa Barat. strategi komunikasi politik yang berfokus pada wilayah yang merupakan basis massa Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII (Kota Bekasi dan Kota Depok) dalam Pemilu Anggota DPRD Jawa Barat Tahun 2019, strategi komunikasi politik dilakukan setiap kader dan caleg dengan cara membangun citra diri yang inklusif, menghilangkan stigma miring di masyarakat, membangun kerjasama, adanya kekuatan kader yang militan dan adanya pengaruh aktor politik lokal yang berkuasa seperti Nur Mahmudi dan Ahmad Syaikhu sehingga menjadi nilai tambah untuk menarik hati masyarakat (Kamal et al., 2021).

Menurut Schroder strategi kampanye merupakan bentuk khusus dari strategi politik yang mempunyai tujuannya untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara memperoleh hasil yang baik dalam pemilihan umum. Selanjutnya Scroder menjelaskan bahwa strategi kampanye terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu, strategi ofensif (menyerang) dan strategi defensif (bertahan).

Strategi ofensif dibagi menjadi strategi untuk memperluas pasar dan strategi untuk menembus pasar. Sementara strategi defensif merupakan strategi untuk mempertahankan pasar dan strategi menutup atau menyerahkan pasar. Strategi ofensif sangat diperlukan jika partai ingin meningkatkan jumlah pemilihnya (Schroder, 2013). Schroder menjelaskan bahwa strategi ofensif yang digunakan untuk menerapkan kebijakan harus menjual atau menampilkan perbedaan terhadap *status quo* atau keadaan yang berlaku saat itu dan menyoroti keuntungan-keuntungan yang

diharapkan darinya. Strategi defensif akan muncul ke permukaan jika partai pemerintah atau sebuah koalisi pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritasnya.

Partai Politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama (Budiardjo, 2007). Kelompok yang terorganisir tersebut menurut Andrew Heywood bertujuan memenangkan kekuasaan pemerintahan melalui sarana pemilihan (Heywood, 2013). Selanjutnya Friedrich dalam Budiardjo mengemukakan partai politik sebagai "Sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan cara merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi Pengurus partai politiknya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material." (Budiardjo, 2007a)

Surbakti (2007) membagi fungsi partai politik dalam beberapa fungsi, yaitu: sebagai sarana komunikasi politik, rekrutmen politik, sarana yang memberikan kesempatan, kontrol politik, ngatur dinamika konflik, sosialisasi politik. Pendapat lain dari Heywood (2013) mengemukakan, partai Politik berfungsi sebagai: Perwakilan, Pembentukan dan Rekrutmen Elite, Perumusan Tujuan, Artikulasi dan Agregasi Kepentingan, Sosialisasi dan Mobilisasi, Pengorganisasian Pemerintahan. Sedangkan menurut Budiardjo (2017) fungsi Partai Politik antara lain: sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengatur konflik..

Berdasarkan asas dan orientasi, partai politik dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu (1) Partai Politik Pragmatis; (2) Partai Politik Doktriner; (3) Partai Politik Kepentingan (Labolo & Ilham, 2015). Partai Politik Pragmatis ialah suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Asas dan orientasi partai ini menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi politik. Partai Politik Doktriner, yaitu suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologi tertentu.

Labolo & Ilham (2015) mengungkapkan bahwa berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik dibedakan menjadi partai massa/lindungan, partai kader (disebut juga partai asas/ideologi) dan partai *catch-all*. Partai Massa adalah partai yang mengutamakan dan mengandalkan jumlah anggotanya. Partai jenis ini memobilisasi massa dengan sebanyak-banyaknya

dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat agar elektabilitas partai pada pemilihan umum dapat meningkat. Adapun Partai Kader merupakan partai yang tidak menekankan kepada banyaknya jumlah anggotanya melainkan terfokus kepada pembentukan loyalitas dan disiplin anggotanya sehingga tercipta sebuah partai yang solid. Partai *Catch-All* yaitu kedua-duanya, menyatakan bahwa partainya mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Partai di Indonesia umumnya lebih condong sebagai Partai *Catch-All* atau disebut juga partai *electoral-profesional* atau partai *rational-efficient*. Pada kenyataannya di Indonesia tidak ada partai yang benar-benar menampilkan ciri dari partai massa atau partai kader, melainkan perpaduan dari kedua jenis partai tersebut. Cirinya adalah di satu sisi, partai mempunyai ideologi tertentu yang dijadikan acuan dalam mencapai tujuan dan orientasi untuk merekrut kader-kader berkualitas yang dapat dijadikan ikon bagi partai tersebut. Namun, di sisi lain kebijakan partai juga memberikan peluang bagi siapa saja yang ingin bergabung menjadi anggota partai tanpa memandang latar belakang pekerjaan, pendidikan, agama, bahkan ideologis sekalipun. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena memang sistem pemilihan umum mensyaratkan jumlah suara yang banyak agar kader yang mereka usung dapat menduduki kursi kekuasaan (Nurjaman, 2014).-

Menurut Budiardjo (2007), partai dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kelompok penekan (*pressure group*), kelompok ini bertujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan bagi partai atau menghindarkan keputusan yang merugikan partai secara umum.
2. Kelompok kepentingan (*interest group*), kelompok ini mempunyai tujuan yang jauh lebih sempit atau lebih khusus daripada partai politik, dimana partai politik mewakili berbagai golongan yang banyak dan juga memperjuangkan kepentingan umum.
3. Gerakan (*movement*) merupakan kelompok atau golongan yang mempunyai tujuan untuk membuat/mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik

Untuk memenangkan hati rakyat banyak maka partai politik membutuhkan strategi-strategi yang jitu yang mampu mengambil hati masyarakat banyak dan juga membuat masyarakat sadar akan keberadaan serta visi dan misi partai politik tersebut. Strategi politik menurut Schoder (2013) diartikan sebagai alat politik untuk memperoleh tujuan, baik itu mendapatkan kemenangan, jabatan, dan kekuasaan. Strategi politik dibutuhkan untuk mencapai cita-cita

politik. Strategi politik juga di artikan sebagai strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik, kemudian untuk memperoleh suara pemilih, harus direncanakan secara hati-hati dan untuk itu diperlukan strategi kampanye merupakan bentuk khusus dari strategi politik. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara memperoleh hasil yang baik dalam pemilihan umum, agar dapat mendorong kebijakan- kebijakan yang dapat mengarah kepada perubahan masyarakat.

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta sebagai partai politik melakukan berbagai upaya sehingga berhasil mendapatkan kursi anggota DPRD pada Pemilihan umum legislatif 2019, dari yang sebelumnya tidak memiliki kursi pada Pemilihan umum legislatif 2014. Upaya yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta tersebut berupa strategi kampanye yang sesuai dengan teori strategi politik milik Schoder yang terdiri dari strategi ofensif dan defensif.

Strategi ofensif yang digunakan untuk menerapkan kebijakan harus menjual atau menampilkan perbedaan terhadap *status quo* atau keadaan yang berlaku saat itu dan menyoroti keuntungan-keuntungan yang diharapkan darinya. Strategi defensif akan muncul ke permukaan jika partai pemerintah atau sebuah koalisi pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritasnya atau jika pangsa pasar ingin dipertahankan.

Strategi ofensif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Strategi Memperluas Pasar (Persaingan), dilakukan melalui: Platform dan Program, Memperluas Jaringan, Rekrutmen Calon Legislatif dari Luar Kader.
2. Strategi Menembus Pasar, dilakukan melalui: Menggali potensi simpatisan, Pembinaan Kader.

Strategi defensif akan muncul ke permukaan jika partai pemerintah atau sebuah koalisi pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritasnya atau jika pangsa pasar ingin dipertahankan. Selain itu, strategi defensif juga dapat muncul apabila sebuah pasar tidak akan dipertahankan lebih lanjut atau ingin ditutup, dan penutupan pasar ini diharapkan dapat membawa keuntungan sebesar-besarnya.

Penelitian ini lebih menekankan pada proses perencanaan strategi dalam analisis SWOT yaitu *strengths, weaknesses, opportunity dan reaches*. Selain itu dalam penelitian ini: (1) dilakukan di wilayah Purwakarta, yang mana

wilayah ini bukan merupakan basis Partai Keadilan Sejahtera dan tidak ada aktor politik lokal dari Partai Keadilan Sejahtera yang berkuasa maupun yang mempunyai pengaruh besar di wilayah ini. Walaupun demikian, Partai Keadilan Sejahtera Purwakarta berhasil memperoleh kursi secara signifikan, dari tidak mempunyai kursi menjadi memiliki 5 kursi di DPRD. Oleh karena fenomena ini dianggap mempunyai keunikan tersendiri, sehingga sangat menarik untuk dijadikan bahan penelitian sehingga dapat diketahui strategi politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk meraih suara dan memperoleh kursi anggota DPRD di Kabupaten Purwakarta; (2) penelitian ini menekankan pada strategi yang digunakan dalam memperoleh kursi dengan menggunakan teori dari Peter Schroder tentang strategi ofensif dan defensif.

## METODE

Pendekatan kualitatif digunakan pada penelitian ini, dimana peneliti mengungkapkan secara empiris strategi kampanye yang dilakukan oleh partai politik, yaitu dalam hal ini adalah Partai Keadilan Sejahtera dalam upayanya untuk mendapatkan kursi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada pemilihan umum Tahun 2019. Pendekatan metode kualitatif ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa metode ini relevan dengan masalah penelitian yang diajukan melalui interpretasi proses dan makna. Adapun unit analisis pada penelitian ini adalah Anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, tim kampanye Partai Keadilan Sejahtera Purwakarta dan relawan atau simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Purwakarta.

Data dari tim kampanye Partai Keadilan Sejahtera akan diambil untuk mengetahui bagaimana strategi kampanye yang dilakukan dalam upaya mendapatkan kursi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan umum Tahun 2019. Selain dari partai secara kelembagaan, unit analisis juga akan diambil dari individu yaitu Anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan anggota legislatif terpilih untuk memperoleh kursi anggota DPRD. Unit analisis selanjutnya yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta sebagai penyelenggara Pemilihan umum yang nantinya akan dimintai informasi tentang data perolehan suara dan proses penetapan kursi anggota DPRD, dan unit analisis yang terakhir adalah akademisi atau pengamat yang ikut mengamati jalannya proses pemilihan umum di Kabupaten Purwakarta. Hal ini dilakukan untuk

mengetahui dinamika politik di Kabupaten Purwakarta menjelang pemilihan umum 2019.

Ada dua sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang terdiri dari Anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, tim kampanye pemilihan umum Partai Keadilan Sejahtera Purwakarta, relawan Partai Keadilan Sejahtera Purwakarta. Selain itu, sumber data primer dapat dilakukan melalui observasi. Untuk data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini, antar lain:

- a. Dokumen-dokumen pencalonan anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera
- b. Dokumen internal Partai Keadilan Sejahtera berkaitan dengan profil, visi, misi dan arah kebijakan partai
- c. Dokumen terkait pelaksanaan kampanye pemilihan umum 2019 yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera
- d. Dokumen terkait wilayah Kabupaten Purwakarta
- e. Peraturan Perundang-undangan yang relevan
- f. Pemberitaan di media massa yang relevan
- g. Dokumen lain yang relevan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain adalah observasi yang dilakukan dengan cara mengamati perilaku para elit partai politik di tingkat Kabupaten Purwakarta atau tim kampanyenya, baik pada saat wawancara maupun dalam berinteraksi (Sugiyono, 2017).

Selanjutnya adalah wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan yang dipilih berdasarkan posisi atau status yang relevan dengan masalah yang diteliti (Moleong, 2018). Diharapkan data yang di dapat akan memberikan informasi kualitatif dengan deskripsi yang penuh makna. Sedangkan pertimbangan pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive*, dimana mereka yang dipilih dianggap benar-benar menguasai masalah, memiliki data yang lengkap dan akurat serta bersedia memberikan data dengan jujur dan objektif. (Ngani, 2012).

Informan kunci antara lain Anggota DPRD terpilih dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Partai Keadilan Sejahtera Purwakarta, Badan/Tim pemenangan pemilihan umum Partai Keadilan Sejahtera Purwakarta, aktivis dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Purwakarta. Wawancara mendalam akan dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur disesuaikan dengan kondisi dan karakter informan dengan tujuan mendapatkan jawaban-jawaban

yang mendalam dan terdapat interaksi yang alamiah antara peneliti dan informan

Studi dokumentasi dilakukan melalui studi literatur/kepastakaan, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku atau bahan-bahan tertulis yang ada hubungannya dengan topik yang akan diteliti, termasuk data-data tertulis lainnya yang berasal dari partai politik, tim kampanye atau badan pemenangan pemilihan umum partai politik, para relawan, calon legislatif atau anggota legislatif terpilih, KPU Kabupaten Purwakarta dan akademisi serta mempelajari dokumen-dokumen yang bersumber dari pemberitaan media masa.

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan atau bahan-bahan lain yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini terdiri: Pengumpulan Data, dimana peneliti mengumpulkan berbagai data dan informasi untuk dianalisis berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya adalah Reduksi Data, dimana peneliti melakukan proses pemilahan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari kumpulan tulisan yang ditulis dari catatan-catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan bahan empiris lainnya. Reduksi data ini berlangsung terus menerus selama proses penelitian berlangsung. (Sunggono, 2016)

Peneliti mengorganisasikan, meringkas sekumpulan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan. Peneliti juga melakukan penafsiran arti dengan mencatat keteraturan, penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi. Kemudian arti atau makna tersebut diuji kelogisannya, kekokohannya, kepastiannya dan kebenarannya.

Menurut Sugiyono (2017) validitas data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data. Triangulasi yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan latar yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan jalan membandingkan suatu dokumen dengan data hasil wawancara, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan, seperti orang parpol, penyelenggara pemilihan umum, orang pemerintahan, pemilih (yang terdiri dari rakyat biasa yang mempunyai hak pilih, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian saat ini adalah Partai Keadilan Sejahtera yang berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) Pada 20 Juli 1998 dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il. Selanjutnya Partai Keadilan harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilihan umum berikutnya berdasarkan UU Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilihan umum selanjutnya (*electoral threshold*) dua persen, maka, pada 2 Juli 2003 Partai Keadilan Sejahtera menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota).

Sehari kemudian, Partai Keadilan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik Partai Keadilan Sejahtera, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Dengan presiden Partai Keadilan Sejahtera hidayat nur wahid hingga tahun 2004. Selanjutnya Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera periode 2005-2010 dan kemudian Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera periode 2010-2015.

Partai Keadilan Sejahtera mempunyai visi dan misi, visi partai ini adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat lima), sedangkan misi Partai adalah menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partai Keadilan Sejahtera mempunyai Tujuan Dan Fungsi dari partainya, Tujuan Partai adalah:

- a. memenuhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab politik setiap Anggota Partai sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. meningkatkan partisipasi politik Anggota Partai dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;

- c. memperjuangkan Visi dan Misi Partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. turut membangun etika dan budaya politik yang beradab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sedangkan Partai berfungsi:

- a. menyelenggarakan pendidikan politik;
- b. menyelenggarakan kaderisasi kepemimpinan bangsa dan negara;
- c. memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara melalui jalur politik; dan memelihara dan memperjuangkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

### Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta

Partai Keadilan Sejahtera Purwakarta merupakan bagian dari struktur partai Partai Keadilan Sejahtera nasional di tingkat Kabupaten/Kota dengan nama Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta. Pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta berjumlah 90 orang. Adapun susunan organisasinya sebagai berikut:

1. Ketua DPD : Ir. H. Moh. Arief Kurniawan, MM
2. Sekretaris DPD : Patria Riza, S.Pt
3. Wakil Sekretaris : Yadi Rusmayadi
4. Bendahara DPD : H. Mashuda, A.Md
5. Bidang Kaderisasi :
  - a. Ketua : Supriyatna, S.Si
  - b. Anggota : 10 orang
6. Bidang Kepanduan
  - a. Ketua : Paryono
  - b. Anggota : 13 orang
7. Bidang Kepemudaan
  - a. Ketua : Ade Syarifudin, S.Pd
  - b. Anggota : 5 orang
8. Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga
  - a. Ketua : Nina Yuniarti Karlina, S.Pd
  - b. Anggota : 11 orang
9. Bidang Pemenangan Pemilihan umum dan Pilkada
  - a. Ketua : Dedi Juhari
  - b. Anggota : 1 orang
10. Bidang Hubungan Masyarakat
  - a. Ketua : Agus Budiono
  - b. Anggota : 3 orang
11. Bidang Hukum Kebijakan Publik dan Tenaga Kerja
  - a. Ketua : Didin Hendrawan, SE
  - b. Anggota : 4 orang
12. Bidang Kesejahteraan Sosial
  - a. Ketua : H. Dedi Sutardi
  - b. Anggota : 2 orang
13. Bidang Pembinaan Ummat

- a. Ketua : Zilalul Haq, S.Pd.I
- b. Anggota : 7 orang
14. Bidang Pengembangan Jaringan dan Ekonomi
  - a. Ketua : Moh. Suhur, ST
  - b. Anggota : 4 orang
15. Bidang Pembinaan Desa, Tani dan Nelayan
  - a. Ketua : Suparman, SM
  - b. Anggota : 9 orang
16. Bidang Pembinaan Cabang 1
 

Ketua : Agus Riyadi, S.TP
17. Bidang Pembinaan Cabang 2
 

Ketua : Idrus Supriatna
18. Bidang Pembinaan Cabang 3
 

Ketua : Muhammad Dhopir Ali
19. Bidang Pembinaan Cabang 4
 

Ketua : Siti Zamaliah, SH
20. Bidang Pembinaan Cabang 5
 

Ketua : H. Supriono, S.Pd.I
21. Bidang Pembinaan Cabang 6
 

Ketua : Muridan

**Tabel 1**  
**Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta**

No.	Nama Anggota Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera	Daerah Pemilihan	Jumlah Alokasi Kursi
1	Dedi Juhari	Purwakarta 1	8
2	Ir. H. Moh. Arief Kurniawan, MM	Purwakarta 2	9
3	Didin Hendrawan, SE	Purwakarta 3	7
4	-	Purwakarta 4	6
5	H. Asep Nuryani, S.Pd.I	Purwakarta 5	8
6	Dedi Sutardi	Purwakarta 6	7

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jenis Penduduk (Jiwa)
Laki-laki	484.576
Perempuan	468.838
<b>Total</b>	<b>953.414</b>

Setelah memperhatikan table di atas berkaitan dengan jumlah dari masyarakat di Kabupaten Purwakarta, dapat diketahui berjumlah sebanyak 953.414 jiwa dengan perincian sebanyak 484.576 jiwa penduduk laki-laki dan 468.838 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan. Maka dapat disimpulkan bahwa penduduk di Kabupaten Purwakarta memiliki jenis kelamin laki-laki.

Schroder menjelaskan bahwa Strategi ofensif sering dipergunakan ketika partai menginginkan adanya peningkatan dari jumlah para pemilih partainya. Dengan adanya pandangan yang baik terhadap partai ini disbanding sebelumnya akan berdampak pada kampanye yang

menghasilkan hal positif. Pada Pemilihan umum Tahun 2019, Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta berupaya meningkatkan jumlah pemilihnya melalui beberapa strategi kampanye, diantaranya strategi yang bersifat ofensif. Menurut Schroder, strategi ofensif terbagi dalam dua kategori strategi, yaitu (1) strategi memperluas pasar; dan (2) strategi menembus pasar.

Strategi perluasan pasar yang agresif dalam pemilihan umum bertujuan untuk menciptakan konstituensi baru bersama dengan pemilih tradisional (tetap) yang sudah ada. Oleh karena itu, tawaran baru atau yang lebih baik harus diberikan kepada para pemilih yang selama ini memilih partai yang menjadi kompetitor. Ini berarti strategi kompetitif yang nyata dimana berbagai pihak bersaing untuk segmen pemilih. Dalam strategi tersebut, Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta melakukan penyebaran dan optimalisasi platform dan programnya. *Platform* dan Program Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta mengacu pada *Platform* dan program Partai Keadilan Sejahtera nasional.

Untuk meraih suara pada Pemilihan umum 2019 Partai Keadilan Sejahtera nasional memperbaharui platformnya yaitu “berkhidmat untuk rakyat” dan program-program unggulan yang ditawarkan. Program-program tersebut antara lain: pertama, pemberlakuan Surat Ijin Mengemudi (SIM) seumur hidup. Kedua, penghapusan pajak kendaraan. Ketiga, perlindungan ulama, tokoh agama dan simbol-simbol keagamaan. Dan yang terakhir adalah pembebasan pajak bagi orang yang berpenghasilan sampai dengan Rp. 8.000.000, - (Tinov & Handoko, 2017)

Partai Keadilan Sejahtera Purwakarta juga melakukan strategi memperluas jaringan dengan merekrut calon legislatif dari luar kader yang mana calon anggota legislatif yang sekarang terpilih, 60% nya berasal dari luar kader. Sedangkan 40% dari dalam kader. Kader-kader yang terpilih tersebut merupakan tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh di bidang industri, tokoh Pendidikan dan tokoh pengusaha, yang ketokohnya tersebut dijadikan modal sosial untuk meraih suara, segala kebijakan termasuk pemilihan calon dari luar kader yang dilakukan oleh pimpinan pusat itu untuk kemaslahatan Partai Keadilan Sejahtera dan sekarang terbukti bahwa para caleg terpilih memang yang terbaik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tim kampanye, Yadi, bahwa Strategi kampanye yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera Purwakarta antara lain: Sosialisasi tentang PKS yang dilakukan oleh kader dan dibantu oleh simpatisan dengan sasaran simpatisan maupun non simpatisan, kampanye cenderung mengajak dari hati ke hati, dilakukan *door*

to door. selain itu, Partai Keadilan Sejahtera sering melakukan kegiatan bakti sosial yang manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kader-kader Partai Keadilan Sejahtera datang ke desa-desa untuk memperkenalkan Partai Keadilan Sejahtera dan merangkul para tokoh di desa. tidak harus tokoh bagi Partai Keadilan Sejahtera, penokohan tidak selalu harus anggota dewan atau calon legislatif, melainkan kader-kader di bawah. Harus jadi tokoh, bukan orang yang tidak dikenal, minimal punya kontribusi, punya khidmat. Tidak harus struktural misal menjadi RT/RW, tapi berkhidmat sesuai kultur masyarakat. Misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat, pun hanya sekedar tukang adzan atau tukang ngepel di masjid, yang penting ada kontribusi ke masyarakat dan kalau bicara dipercaya oleh masyarakat

Selanjutnya Partai Keadilan Sejahtera menggunakan strategi ofensif memperluas pasar juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, dalam hal ini, Partai Keadilan Sejahtera Purwakarta memanfaatkan jaringan media sosial.

Strategi Partai Keadilan Sejahtera Purwakarta selanjutnya adalah menembus Pasar (Strategi pelanggan) yaitu dengan cara mengoptimalkan kekuatan kader, yaitu pembinaan kader serta terus menggali potensi simpatisan. penggalian potensi yang sudah ada secara lebih optimal, atau penggalian bagian yang dimiliki dalam kelompok target di mana keberhasilan telah diraih sebelumnya.

Dalam hal ini, Partai Keadilan Sejahtera Purwakarta melakukannya dengan cara mengoptimalkan kekuatan kader, yaitu pembinaan kader serta terus menggali potensi simpatisan. Selanjutnya adalah strategi mempertahankan pasar (strategi pelanggan/ strategi multiplikator) Salah satu strategi dari pendekatan pemilih, yaitu dengan memelihara pemilih tetap atau pemilih tradisional, dalam konteks ini Partai Keadilan Sejahtera Purwakarta memperkuat dan merangkul pemilih tetapnya atau simpatisan yang memang sudah loyal terhadap Partai Keadilan Sejahtera. Pemilih dengan kategori itu berada di wilayah pusat Kota Purwakarta, seperti di Daerah pilihan 1 (Kecamatan Purwakarta) dan Daerah pilihan 2 (Kecamatan Campaka, Babakancikao, Bungursari, Cibatu).

Kemudian strategi yang di gunakan selanjutnya adalah Strategi menutup/ menyerahkan pasar (strategi lingkungan sekitar). di Indonesia, pemilihan putaran pertama dan kedua lumrah terjadi. Namun dalam konteks pemilihan umum legislatif, tidak ada putaran kedua. Partai-partai bertarung dalam putaran pertama, dan strategi defensif menyerahkan pasar biasanya

dilakukan oleh partai yang suaranya amat kecil yang tidak mencapai *parliamentary threshold*, yang pada akhirnya ada yang melebur dengan partai lain atau membuat partai baru, atau partai lama dengan nama baru, kemudian ikut serta lagi dalam pemilihan umum berikutnya. Partai Keadilan Sejahtera secara nasional mencapai *parliamentary threshold*, hanya saja pada Pemilihan umum 2014 tidak berhasil mendapatkan kursi DPRD di Kabupaten Purwakarta.

Strategi lainnya yang di ambil oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk mencapai suara di Pemilihan umum 2019 adalah dengan mencoba melebur dengan partai lain dalam konteks kandidasi pencalonan kepala daerah atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, di mana mencoba mendukung koalisi Gerindra dan Hanura dengan mencalonkan Rustandie dan Dikdik meskipun Partai Keadilan Sejahtera tidak punya kursi. Walaupun pada akhirnya pencalonan tersebut ditolak karena adanya Surat rekomendasi pencalonan ganda di tubuh partai hanura yang membuat pasangan Rustandie-Dikdik gagal maju sebagai calon kepala daerah.

Dan terakhir Partai Keadilan Sejahtera juga bermanuver pada Pilkada 2018 yang tahapannya bersamaan dengan tahapan Pemilihan umum 2019, di mana Partai Keadilan Sejahtera resmi mendukung kandidat dari independent yaitu pasangan Zainal Abidin – Luthfi Bamala. Walaupun pada akhirnya suara Zainal-Luthfi kalah, tapi perolehan suaranya cukup signifikan, sehingga dapat menjadi bekal bagi Partai Keadilan Sejahtera untuk memetakan basis massa yang tidak mendukung partai pengusung Anne-Aming dan kemudian dijadikan target kampanye untuk Pemilihan umum 2019. (M.A, mantan aktivis Partai Keadilan Sejahtera, wawancara Juli 2022).

Strategi kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta dalam upaya mendapatkan kursi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada pemilihan umum Tahun 2019 dilakukan dengan strategi ofensif maupun defensif. Strategi ofensif memperluas pasar dilakukan dengan cara penyebarluasan dan optimalisasi platform dan programnya, memperluas jaringan dengan merekrut calon legislatif dari luar kader, serta menarik kelompok pemilih baru dengan memperluas jangkauan ke pelosok desa.

Adapun strategi ofensif menembus pasar dilakukan dengan cara mengoptimalkan kekuatan kader, yaitu pembinaan kader serta terus menggali potensi simpatisan. Sedangkan strategi defensif dilakukan melalui dua cara yaitu strategi mempertahankan pasar dan strategi melepas atau menyerahkan pasar.

### **Strategi Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta Dalam Memperoleh Kursi Di DPRD Kabupaten Purwakarta Pada Pemilihan Umum 2019**

(Rima Nurmalina, Wawan Budi Darmawan, Husin M. Al Banjari)

Strategi mempertahankan pasar dilakukan dengan cara memelihara pemilih tetap atau pemilih tradisional, dalam konteks ini Partai Keadilan Sejahtera Purwakarta memperkuat dan merangkul pemilih tetapnya atau simpatisan yang memang sudah loyal terhadap Partai Keadilan Sejahtera. Strategi defensif menyerahkan pasar dilakukan dengan cara bergabung dan mendukung kandidat pada pemilihan kepala daerah di mana waktu tahapannya bersamaan dengan tahapan pemilihan umum.

Dengan berbekal strategi politik diatas tersebut maka Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta berhasil menaikkan 500% jumlah suara untuk mendapatkan 5 kursi di DPRD Kabupaten Purwakarta. Saran akademik bagi yang ingin meneliti lebih lanjut strategi kampanye Partai Keadilan Sejahtera agar lebih mendalami faktor budaya politik di Purwakarta, karena itu tidak bisa dilepaskan dari perilaku memilih masyarakat sedangkan saran praktik adalah Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai yang identik dengan partai islam yang eksklusif harus bisa lebih membuka diri (inklusif) dan beradaptasi dengan budaya masyarakat Purwakarta serta Partai Keadilan Sejahtera harus lebih mengembangkan kebermanfaatannya tidak lagi hanya untuk satu golongan tapi untuk semua masyarakat tanpa terkecuali. Dengan demikian, Partai Keadilan Sejahtera akan lebih diterima secara luas.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ibu Dra. Mudiwati Rahmatunnisa, M.A.,Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, serta Ketua Sidang dan dosen penguji. Ibu Caroline Paskarina, S.IP., M.Si selaku penguji, Bapak Ari Ganjar Herdiansah, S.Sos., M.Si., Ph.D selaku penguji. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta. DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik* (I). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Heywood, A. (2013). *Politik Edisi Keempat* (IV). Pustaka Pelajar.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia - Teori, Konsep dan Isu Strategis* (1st ed.). PT. Raja Grafindo Persada.

- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Rosdakarya.
- Ngani, N. (2012). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum* (D. Anggraini (ed.); 1st ed.). Tim Pustaka Yustisia.
- Schroder, P. (2013). *Strategi Politik (Politische Strategien)* (A. Agoesman (ed.); 3rd ed.). Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Sutopo (ed.); 9th ed.). Alfabeta Bandung.
- Sunggono, B. (2016). *Metode Penelitian Hukum* (16th ed.). PT Rajagrafindo Persada.

#### Jurnal

- Tiyas, T. M., & Handoko, T. (2017). Strategi Politik; Preferensi Partai Politik Menghadapi Pemilihan umum Di Aras Lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(25), 53–64. <https://doi.org/10.35967/jipn.v15i25.3855>
- Timbangnusa, B. (2015). Strategi Partai Demokrat Pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7), 1–12.
- Perdana, Y. A. (2014). Strategi Kampanye Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Pileg 2014 Di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip*, 3(3), 296–310.
- Kamal, A. M., Darmawan, W. B., & Agustino, L. (2021). Strategi Komunikasi Politik PKS Jawa Barat Dalam Meningkatkan Perolehan Suara pada Pemilu 2019. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1184–1192. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.519>

#### Artikel Online

- Ani. (2019). *Garbi, Gerbong Anis Matta yang Jadi Ancaman Belah Suara PKS*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190712141744-32-411588/garbi-gerbong-anis-matta-yang-jadi-ancaman-belah-suara-pks>
- Fakta Jabar. (2019). *Disahkan! 45 Anggota DPRD Purwakarta*. <https://www.faktajabar.co.id/>. <https://www.faktajabar.co.id/2019/07/23/disahkan-45-anggota-dprd-purwakarta/>
- Kirom. (2019). *Diganti Cuma Lewat Surat, 300 Pengurus DPD PKS Tangerang Mundur*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/politik/diganti-cuma-lewat-surat-300-pengurus-dpd-pks-tangerang-mundur.html>